

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH 2012-2016

THE EFFECT OF PAD, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, CAPITAL EXPENDITURES TOWARD FINANCIAL PERFORMANCE OF CENTRAL JAVA YEAR 2012-2016

Tri Yuni Pratiwi

Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

Pratiwiyuni97@gmail.com

Moh. Djazari. M. Pd

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak: Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara sendiri-sendiri dan bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan nilai $(r_{x1y}) = 0,733$, $(r^2_{x1y}) = 0,537289$, dan $t_{hitung} 14,146 > t_{tabel} 1,9732$. 2) Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan nilai $(r_{x2y}) = 0,001$, $(r^2_{x2y}) = 0,000001$, dan $t_{hitung} -0,01 < t_{tabel} 1,9739$. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan nilai $(r_{x3y}) = 0,368$, $(r^2_{x3y}) = 0,135424$, dan $t_{hitung} 5,189 > t_{tabel} 1,9739$. 4) Terdapat pengaruh positif PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan nilai $(R_{y(1,2,3)}) = 0,841$, $(R^2_{y(1,2,3)}) = 0,707281$, $F_{hitung} 137,131 > F_{tabel} 2,66$.

Kata Kunci : PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract: *The Effect Of Pad, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures Toward Financial Performance Of Central Java Year 2012-2016. The aims of this research to know the impact of PAD, Intergovernmental Revenue, and Capital Expenditures partially and simultaneously to Financial Performance of Central Java 2012-2016. The Technic of data collection are using documentation method. The hypothesis test of this research is using simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis. The result of the research shows that: 1) There are positive and significant effect of PAD To Local Government Financial Performance it showed by $(r_{x1y}) = 0,733$, $(r^2_{x1y}) = 0,537289$, and $t_{hitung} 14,146 > t_{tabel} 1,9732$. 2) There are positive effect however it not significant of Intergovernmental Revenue to Local Government Financial Performance it showed by $(r_{x2y}) = 0,001$, $(r^2_{x2y}) = 0,000001$, and $t_{hitung} -0,01 < t_{tabel} 1,9739$. 3) There are positive and significant effect of Capital Expenditure Local Government Financial Performance it showed by $(r_{x3y}) = 0,368$, $(r^2_{x3y}) = 0,135424$, and $t_{hitung} 5,189 > t_{tabel} 1,9739$. 4) There are positive effect of PAD, Intergovernmental Revenue, And Capital Expenditure simultaneously to Local Government Financial Performance it showed by $(R_{y(1,2,3)}) = 0,841$, $(R^2_{y(1,2,3)}) = 0,707281$, and $F_{hitung} 137,131 > F_{tabel} 2,66$.*

Keywords : *PAD, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures, and Financial Performance of Regency and Municipal Governments*

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi atau visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan organisasi atau tertentu disebut dengan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu dikatakan sebagai Kinerja Keuangan (*financial performance*).

Kinerja Keuangan menurut Fahmi (2012: 2) adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa

pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Prakteknya laporan keuangan daerah memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, selain itu adanya keterbatasan pemahaman akan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Adanya kendala yang terdapat dalam penyusunan keuangan daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 25). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai

bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Kenyataan yang terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Terlihat dari persentase Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 60,82 persen. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah penerimaan Dana Perimbangan masing-masing daerah masih di atas 50 persen, dengan rata-rata persentase Dana Perimbangan

yang diterima sebesar 61,66 persen (statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2015, data diolah kembali).

Menurut Mardiasmo (2007: 96) pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Diterimanya Dana Perimbangan oleh masing-masing daerah di atas 50 persen mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal

belum mencapai 30 Persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di mata masyarakat menurut Nur (2011). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Halim (2014: 9) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai yang persentasenya terlalu tinggi dibandingkan Belanja Modal sebuah problematika yang sudah sering menjadi berita. Hal ini dibuktikan dengan melihat realisasi penggunaan dana APBD untuk Belanja Pegawai pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 56 persen, sementara untuk realisasi Belanja Modal sebesar 17 persen dari anggaran APBD. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta menggali potensi sumber pajak lain dan mengoptimalkan pencairan piutang pajak guna mendukung ketercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini hanya mampu ini hanya mampu tercapai 90,36% dari target APBD. Rendahnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ini merupakan dampak dari kinerja dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Pendapatan sektor pajak di Provinsi Jawa Tengah hanya terealisasi sebesar 86,48% dari target yang direncanakan. Tidak tercapainya target PAD disebabkan oleh gagalnya pendapatan target Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kecenderungan rendahnya Pajak Daerah didorong oleh serapan PKB dan BBNKB yang terhitung masih rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada

ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis mengambil judul: “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016:5).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017- Januari 2018.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

a. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sampai dengan 2016.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari, mencatat, dan mengolah data yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan berganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

(1) Uji Asumsi Klasik

(a) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*-nya (*Variance Inflation Factor*). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai *VIF* kurang dari 10,00 (Ghozali, 2011:106).

(b) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model, dimana akan menyebabkan terjadinya kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Uji ini melalui uji *Durbin Watson (DW-Test)*. Uji *Durbin Watson (DW test)* akan didapatkan nilai *DW* hitung (d) dan nilai *DW* tabel (dL dan dU). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%.

(c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji *White Test* yaitu dengan cara membandingkan nilai *Chi-Square* hitung (*R-Square* X Jumlah Observasi), dengan *Chi-Square* tabel dengan ketentuan *degree of freedom* (derajat kebebasan) sesuai dengan jumlah variabel bebas (independen) model penelitian, sedangkan signifikansinya adalah pada 0,05 sehingga dapat diketahui apakah asumsi homogenitas terpenuhi atau tidak.

(2) Uji Hipotesis

(a) Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah/ Dana Perimbangan/ Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi adalah $Y = a + bX$, nilai koefisien korelasi (r_{xy}), nilai koefisien determinasi (r^2), dan pengujian signifikansi dengan uji t yaitu nilai t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Sebaliknya apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

(b) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa (lebih dari satu) variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) dengan satu variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah). Persamaan yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$, nilai koefisien korelasi $R_{Y(1,2,3)}$, nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$), dan pengujian signifikansi dengan uji F yaitu digunakan untuk mengetahui signifikansi regresi berganda R^2 . Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ dengan signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menggunakan model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*-nya (*Variance Inflation Factor*). adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
X_1	1,962	0,510	Tidak terjadi multikolinieritas
X_2	1,967	0,508	Tidak terjadi multikolinieritas
X_3	2,943	0,340	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk ketiga variabel dibawah 10,00. Selain itu, nilai *Tolerance* ketiga variabel independen menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan Uji *Durbin Watson* (*DW test*), yang akan didapatkan nilai *DW* hitung (*d*) dan nilai *DW* tabel (*dL* dan *dU*).

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,841	0,708	0,702	7,40648	1,901

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,901 sementara dari tabel *Durbin Watson* dengan signifikansi 0,05, jumlah sampel sebanyak 175, serta jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel ($k=3$) diperoleh nilai *dL* sebesar 1,7180 dan *dU* sebesar 1,7877. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4-dU$, maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai *Durbin-Watson* terletak diantara *dU* dan $4-dU$. Data *dU* sebesar 1,7877 sehingga $4-dU$ adalah sebesar 2,213 maka hasilnya $1,7877 < 1,901 < 2,213$. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari pengujian uji heteroskedastisitas menggunakan uji *White*.

Tabel 7. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,841	0,708	0,702	7,40648	1,901

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7, Nilai *Chi Square* bisa dihitung dengan cara mengalikan *R Square* dengan jumlah data ($n=175$). Pada tabel tersebut menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,090, sehingga didapat nilai *Chi Square* hitung adalah sebesar 15,75. Pada tabel *Chi Square*, diperoleh nilai *Chi Square* tabel sebesar 205,779. Hal ini menandakan bahwa *Chi Square* hitung $<$ *Chi Square* tabel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode regresi, sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Sederhana Uji Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi linier sederhana PAD terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Pertama

Model Regresi X ₁	X ₁ -Y
(r _{x1y})	0,733
(r ² _{x1y})	0,537289
Sig.	0.000
Konstanta	76,341
Koefisien	0,00006
t _{hitung}	14,146
t _{tabel}	1,9739

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 8 di atas maka persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 76,341 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah ($X_1 = 0$) maka besarnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah = nilai konstanta. Nilai koefisien regresi sebesar 0,00006 menunjukkan bahwa jika PAD (X_1) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,00006 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai

koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,733, nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,537289, dan nilai t_{hitung} sebesar 14,146 sementara t_{tabel} sebesar 1,9739. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,146 > 1,9739$), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai Koefisien Determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,537289. Hal ini menunjukkan bahwa 53,8% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, sedangkan 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis pertama tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Uji Hipotesis Kedua

Hasil analisis regresi linier sederhana Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Kedua

Model Regresi X ₂	X ₂ -Y
(r _{x2y})	0,001
(r ² _{x2y})	0,000001

Sig.	0,992
Konstanta	88,798
Koefisien	-3,496E-8
t_{hitung}	-0,010
t_{tabel}	1,9739

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat disusun persamaan regresinya yaitu $Y = 88,798 - 0,00000003 X_2$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 88,798 menyatakan bahwa jika Dana Perimbangan ($X_2 = 0$) maka besarnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah = nilai konstanta. Nilai koefisien regresi sebesar $-0,00000003$ menunjukkan bahwa jika Dana Perimbangan (X_2) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar $-0,00000003$ dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,001, nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,000001, t_{hitung} sebesar -0,01 sementara t_{tabel} sebesar 1,9739. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,01 < 1,9739$), menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien determinasi

($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa 0,0001 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Dana Perimbangan (X_2), sedangkan 99,999 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis kedua tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Uji Hipotesis Ketiga

Hasil analisis regresi linier sederhana Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Ketiga

Model Regresi X₂	X₃-Y
(r_{x_3y})	0,368
($r^2_{x_3y}$)	0,135424
Sig.	0,000
Konstanta	80,589
Koefisien	0,00003
t_{hitung}	5,189
t_{tabel}	1,9739

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat disusun persamaan regresinya

yaitu $Y = 80,589 + 0,00003 X_3$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 80,589 menyatakan bahwa jika Belanja Modal ($X_3 = 0$) maka sebesar nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah = nilai konstanta. Nilai koefisien regresi sebesar 0,00003 menunjukkan bahwa jika Belanja Modal (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,00003 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0.368, nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,135424, nilai t_{hitung} sebesar 5,189 sementara t_{tabel} sebesar 1,9739. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,189 > 1,9739$), menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,135424 Hal ini menunjukkan bahwa 13,5% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, sedangkan 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Berdasarkan penjelasan hasil uji hipotesis ketiga

tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Uji Hipotesis Keempat

Hasil analisis regresi linier berganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Hasil Pengujian Regresi Berganda.

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	92,481	49,423	0,000
X_1	7,700E-5	16,005	0,000
X_2	-2,402E-5	-8,634	0,000
X_3	6,390E-6	0,968	0,334
$(R_{y(1,2,3)})$			0,841
Koefisien determinasi ($R^2_{Y(1,2,3)}$)		0,707281	
F_{hitung}			137,131
Sig F			0,000
F_{tabel}			2,66

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat disusun persamaan regresinya yaitu $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2 + 0,000006 X_3$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 92,481, menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal) atau variabel independen = 0 maka besarnya nilai

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sama dengan konstanta. Nilai koefisien X_1 sebesar 0,00007 yang berarti Pendapatan Asli Daerah (X_1) meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,00007 dengan asumsi X_2 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_2 sebesar -0,00002 yang berarti Dana Perimbangan (X_2) meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,00002 dengan asumsi X_1 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_3 sebesar 0,000006 yang berarti Belanja Modal (X_3) meningkat sebesar 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,000006 dengan asumsi X_1 , dan X_2 tetap. Nilai koefisien korelasi $R_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,841, nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) menunjukkan hasil sebesar 0,707281, dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan nilai sebesar $137,131 > 2,66$ menunjukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai koefisien determinasi

($R^2_{y(1,2,3)}$) menunjukkan hasil sebesar 0,707281 berarti bahwa besarnya pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 70,8%, sedangkan sisanya yaitu 29,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$, nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,733, nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,537289, dan nilai t_{hitung} sebesar $14,146 > t_{tabel} 1,9739$.

- b. Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 88,798 - 0,00000003 X_2$, nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) yaitu sebesar 0,001, nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,000001, dan nilai t_{hitung} sebesar $- 0,010 < t_{tabel}$ sebesar 1,9739.
- c. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 80,589 + 0,00003 X_1$, nilai koefisien korelasi (r_{x_3y}) yaitu sebesar 0,368, nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,135424, dan nilai t_{hitung} sebesar $5,189 > t_{tabel}$ sebesar 1,9739.
- d. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan persamaan regresi $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2 + 0,000006 X_3$, nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,841, nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,707281, dan Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan nilai sebesar $49,423 > 2,66$.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

a. Bagi Instansi

Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi yaitu dengan pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi, karena Pendapatan Asli Daerah adalah penentu kemandirian daerah.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai salah satu pengendali kegiatan pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah jika dilihat dari segi

keuangan dan ditujukan untuk umum. Masyarakat diharapkan bisa menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah yang lebih baik dengan cara sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sesuai kebutuhan masyarakatnya, terutama di daerah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi-provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamda. S. (2016). *Buku Ajar Metlit dan statistik*. CV Budi Utama: 2016.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). "Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen". *Artikel*. <http://keuda.kemendagri.go.id/artike>
- [/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen](http://detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen).
- Ghozali. I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim. Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Irham. Fahmi. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Jawa Tengah Pos. (2015). "Jawa Tengah diminta gali potensi sumber pajak lain". Berita. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/27/o7tyb6361-jawa-tengah-diminta-gali-potensi-sumber-pajak-lain>.
- KSAP. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahsun. M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF: Yogyakarta

Nur, T. (2011). *Tiga belas masalah pengelolaan keuangan negara dan daerah.*

www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com.

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*

tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.*